

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas perkenannya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2014 dapat kami selesaikan.

Lakip ini menggambarkan program dan kegiatan yang menjadi tupoksi BPLH dan memuat target dan capaian kinerja program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan.

Sistematika penulisan LAKIP pada prinsipnya telah sesuai dengan PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 tersebut berdasarkan rencana Strategis Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami nantikan.

Soreang, Februari 2015

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG**

Ir. Hj. ATIH WITARTIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19601225 198603 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii-iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v –vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum	Hal I-1
1.1.1 Struktur Organisasi	Hal I-2
1.1.2 Kondisi dan Potensi	Hal I-2
1.1.3 Kewenangan	Hal I-4
1.2 Penyusunan lakip	Hal I-4
1.2.1 Maksud dan tujuan	Hal I-4
1.2.2 Diagram alur pekerjaan penyusunan LAKIP	Hal I-5
1.2.3 dasar Hukum	Hal I-6
1.3 Sistematika Penulisan	Hal I-6
BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015	Hal II-1
2.1 Visi dan Misi	Hal II-1
2.2 Tujuan Strategis	Hal II-2
2.3 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah	Hal II-3
2.4 sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	Hal II-4
2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2014	Hal II-7
BAB III RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014	Hal III-1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2014	Hal III-1
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja sasaran	Hal III-6
3.2.1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di Bidang Lingkungan Hidup	Hal III-6
3.2.1.1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Hal III-6 Hal III-7
3.2.2 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Hal III-7

3.2.2.1 Kegiatan Pemantuan Kualitas Lingkungan	Hal III-8
3.2.2.2 kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan lahan	Hal III-9
3.2.2.3 Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Hal III-10
3.2.3 Melaksanakan Koordinasi dan Kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk Mewujudkan Integrasi, Sinkronisasi dan harmonisasi Program Pengelolaan Lingkungan.	Hal III-10
3.2.3.1 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Hal III-10
3.2.3.2 Kegiatan Pemantuan Kualitas Lingkungan Subkegiatan Rapat Koordinasi	Hal III-11
3.2.3.3 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Hal III-12
3.2.3.4 Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber sumber air	Hal III-12
3.2.3.5 Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Hal III-13
3.2.4 Mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya ALam dan lingkungan hidup	Hal III-14
3.2.4.1 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Hal III-14
3.2.4.2 Kegiatan Pengembangan data dan Informasi lingkungan	Hal III-14
3.2.4.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hal III-14
3.2.5 Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan	Hal III-15
3.2.6 Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pengelolaan Lingkungan	Hal III-15
3.2.6.1 Kegiatan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Hal III-15
3.2.6.2 Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah padat dan Limbah Cair	Hal III-15
3.2.6.3 Kegiatan Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Hal III-17
3.2.6.4 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Lingkungan	Hal III-18
3.2.6.5 Kegiatan alat penjernih air sungai	Hal III-18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	Hal III-19

BAB IV PENUTUP

Hal IV-1

4.1 Kesimpulan

Hal IV-1

4.2 Langkah Ke depan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu bidang pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan hukum dan kemitraan lingkungan, serta melaksanakan ketatausahaan badan. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPLH Kabupaten Bandung membangun visi” “Terwujudnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang proaktif dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan “. Visi tersebut dijabarkan melalui 6 misi yang masing-masing memiliki sasaran dan tujuan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPLH, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan keenam misi tersebut untuk mencapai visi.

Tahun 2014 merupakan tahun ke-4 dari 5 tahun program jangka menengah Kabupaten Bandung yang berakhir pada tahun 2015. Pada tahun 2014 ini BPLH Kabupaten Bandung telah melaksanakan 8 program dan 30 kegiatan, termasuk 4 program dan 17 kegiatan yang harus ada di SKPD dan 4 program dan 13 kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan urusan lingkungan hidup. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2014 .

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa misi ke-1, yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup” didukung oleh kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; misi ke-2, yaitu “Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan” didukung oleh kegiatan-kegiatan: Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, dan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran. Selanjutnya misi ke-3, yaitu Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan didukung oleh kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Subkegiatan rapat koordinasi pada kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air, dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup; misi ke-4, yaitu “Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup” didukung oleh kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, dan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan; misi ke-5, yaitu “Mengoptimalkan penegakan hukum

lingkungan” didukung oleh kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; dan misi ke-6, yaitu “Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan” didukung oleh kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair, Pengujian Emisi/Polusi Udara kibat Aktivitas

Industri, Pembangunan Tempat Pengolahan Limba Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi, dan Kordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.

BPLH menetapkan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, persentase cakupan pengawasan dokumen/izin lingkungan, persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan, persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu, perolehan nilai Adipura, jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas, jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat masyarakat, jenis dokumen yang dapat diakses, luas tanah untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya, persentase kegiatan penertiban pelanggar hukum lingkungan, persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup, persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji, dan jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah.

Untuk mendukung IKU, maka ditetapkan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja (IK) untuk mengukur gambaran pencapaian dalam kurun waktu penetapan Renstra, yaitu tahun 2010-2015. Dari 45 IK tersebut, 38 (tiga puluh delapan) IK diantaranya menjadi indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 termasuk IK yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Hasil analisis dan evaluasi terhadap kinerja selama tahun 2014 yang dinilai melalui IK menunjukkan bahwa realisasi IK terhadap target tahun 2014 adalah 96,2%. Sebagian besar realisasi IK terhadap target adalah 100%, yaitu bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan. Beberapa IK yang belum mencapai target memberikan gambaran bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih harus ditingkatkannya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Adapun realisasi IKU terhadap target pada tahun 2014 adalah 66,18%. Dengan demikian, maka untuk mencapai IKU pada tahun 2015 dibutuhkan pencapaian sekira 34% terhadap target.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2014 penyerapan keuangan pada tahun 2014 adalah Rp. 10.189.797.606 atau (89,87%) dari seluruh anggaran.

Adapun solusi kendala tersebut adalah mengikutkan personil pada diklat PPNS dan berkoordinasi dengan BKPP untuk prosedur pelatihan PPLHD, menganggarkan kendaraan dinas yang memadai, mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh BPLH Kabupaten Bandung serta mewujudkan peningkatan baik SDM, sarana prasarana, kelembagaan maupun pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tupoksi BPLH Kabupaten Bandung, menyelaraskan serta mengaplikasikan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, menjalin kemitraan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai instansi pemerintah serta pemangku kepentingan yang terkait dan memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sehingga mereka mau dan mampu secara bersama-sama dengan pemerintah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan bentuk pemerintahan yang baik, secara preventif dilaksanakan dalam bentuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan arahan presiden yang menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berkinerja tinggi, maka seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai apa yang sedang dan telah dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada masyarakat selaku *stake holder* utama bangsa ini.

Untuk hal tersebut itulah berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) maka disusunlah Lakip yang berisi uraian kegiatan yang telah dilaksanakan yang mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan.

1.1 Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menitik beratkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, yang mana di dalamnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan Pemerintah Pusat, yakni Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, dan Agama. Dalam kewenangannya kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal.

Berdasarkan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan restrukturisasi organisasi melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21), Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 dimaksud Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu bidang pengendalian lingkungan hidup, yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan hukum dan kemitraan lingkungan, serta melaksanakan ketatausahaan badan. Adapun fungsinya adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini struktur organisasi, kondisi dan potensi, serta kewenangan BPLH.

1.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPLH Kabupaten Bandung tercantum dalam Gambar 1-1, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Penyusunan Program
 - Subbagian Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - Subbidang Penerapan Manajemen Lingkungan
 - Subbidang Analisis Dampak Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 - Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
 - Subbidang Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan B3
- e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam
 - Subbidang Pengendalian Kerusakan Lahan
- f. Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan Lingkungan, membawahkan:
 - Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - Subbidang Kemitraan Lingkungan
- g. UPT Laboratorium Lingkungan, membawahkan:
 - Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

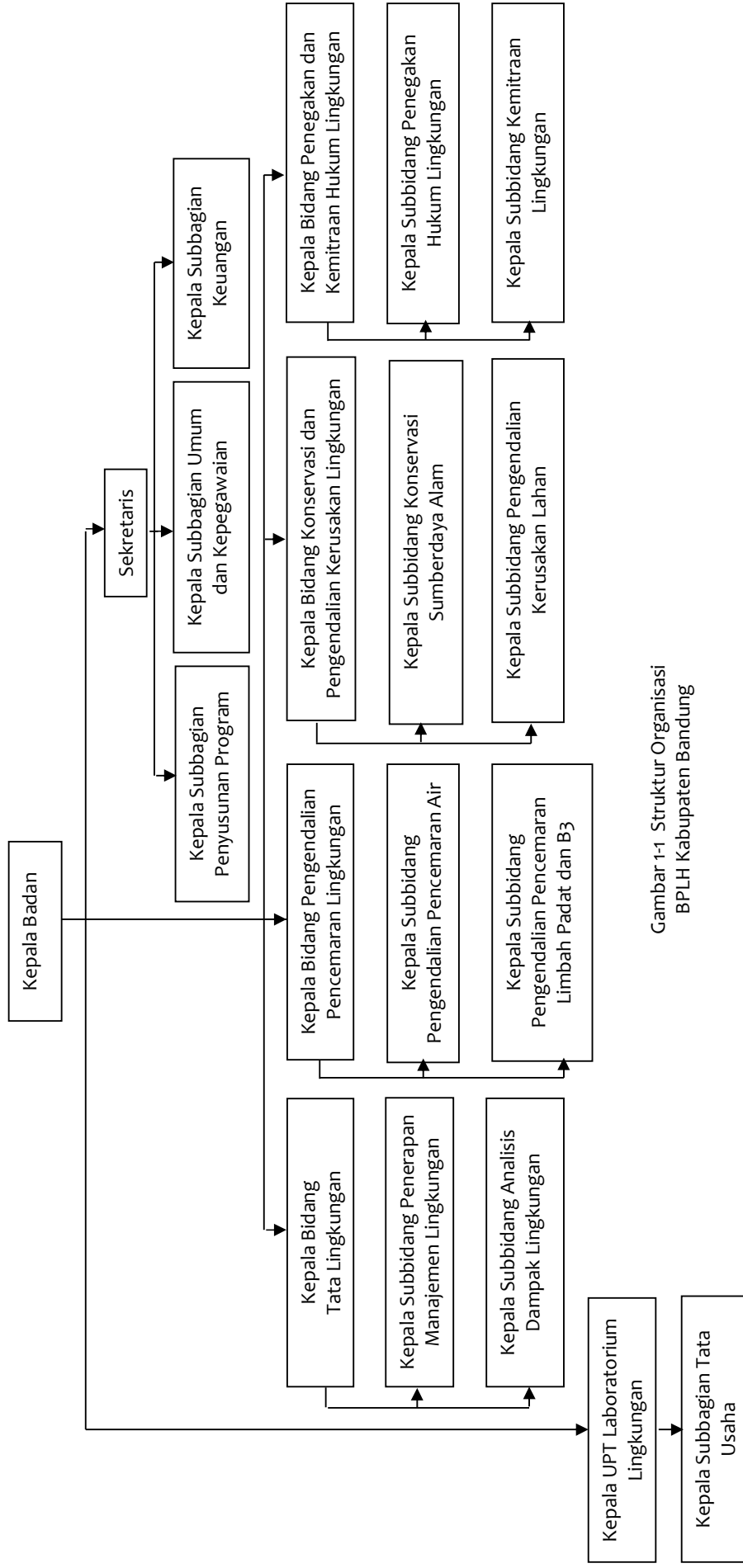
Rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu adanya dukungan sumber daya aparatur BPLH Kabupaten Bandung yang kredibel, profesional, disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi terlebih dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan reformasi, sehingga pulihnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan baik pada sistem kerja maupun personil-personil dari aparatur itu sendiri dapat segera terwujud secara nyata.

Dengan mencermati kondisi perkembangan pemerintah yang makin kompleks, untuk maju secara mandiri dalam upaya mengejar ketertinggalan sebagai akibat terjadinya krisis yang multi dimensi, maka suatu lembaga pemerintah dituntut memiliki visi yang berpandangan jauh ke depan, untuk mencapai suatu keberhasilan pembangunan yang lebih baik dari saat sekarang.

1.1.2 Kondisi dan Potensi

Pegawai BPLH Kabupaten Bandung sebanyak 67 orang dengan latar belakang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 7 orang, Sarjana sebanyak 25 orang, Diploma III sebanyak 5 orang, dan SLTA atau setingkat SLTA sebanyak 27 orang dan setingkat SD/MI sebanyak 3 orang serta sekitar 75% telah mengikuti diklat-diklat Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi BPLH Kabupaten Bandung

BPLH Kabupaten Bandung memiliki pula sarana prasarana Laboratorium Lingkungan yang dapat melakukan pengujian kualitas air dan udara ambien, tersedianya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup -walaupun jumlahnya sangat terbatas-, dan terjalannya kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, lembaga penelitian, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti dengan KODIM 0609.

Dari kondisi tersebut, BPLH berpotensi untuk melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan secara rutin dan berkala, melaksanakan pembinaan dan kegiatan sosialisasi dalam rangka pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sehingga kondisi Kabupaten Bandung dengan potensi sumber daya alamnya berupa luasan kawasan hutan, sumber daya air dari mata air, sungai dan tanah dalamnya, kegiatan industri, pertanian dan permukiman dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam pembangunan dengan arah kebijakan sistem pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, atau dengan kata lain bahwa pembangunan yang dilakukan disusun sebagai suatu proses jangka panjang yang berkesinambungan dan pelaksanaannya tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.

1.1.3 Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan prioritas pembangunan dengan diantaranya adalah pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana. Untuk hal tersebut BPLH memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

1.2 Penyusunan Lakip

Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu pelaporan LAKIP sebagai salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik.

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan Lakip merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, dimana Lakip merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. Selanjutnya, Lakip berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Organisasi Instansi Pemerintah.

4. Lakip sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk

perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Bupati untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (*public accountability*) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

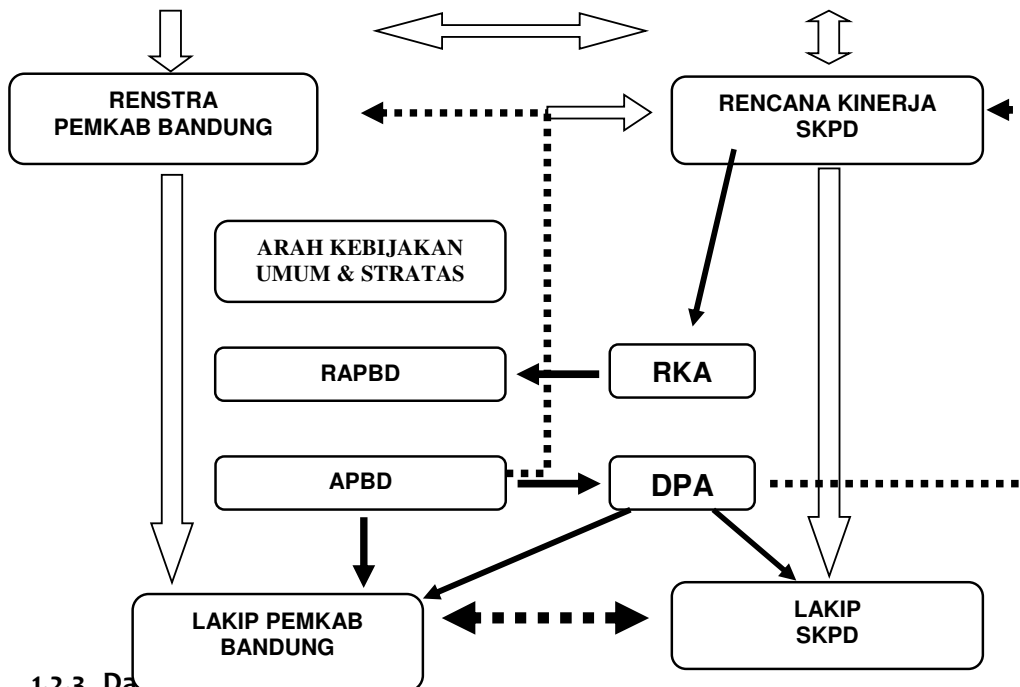
5. Perbaikan *governance* dan manajemen.
6. Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan Lakip yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Adapun tujuan penyusunan Lakip adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (*responsibility center*) serta menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). Lakip ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.2.2 Diagram Alur Pikir Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2012 mengikuti alur pikir sebagai berikut :



1.2.3 Da

Dasar hukum penyusunan Lakip adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Surat Keputusan Kepala LAN RI No 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010

1.3 Sistematika Penulisan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan sejauhmana BPLH Kabupaten Bandung mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Gambaran Umum berisi Struktur Organisasi BPLH Kabupaten Bandung, Kondisi dan Potensi, Kewenangan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Penyusunan Lakip berisi Maksud dan Tujuan, Diagram Alur Pikir, dan Dasar Hukum Penyusunan LAKIP; dan Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis yang menguraikan secara singkat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program, dan Rencana Kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2013 yang menguraikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Strategis sesuai dengan program dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Berisi tujuan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja BPLH Kabupaten Bandung dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015

Rencana Strategis BPLH disusun agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan BPLH serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam penyusunan Rencana Strategis BPLH dimuat daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD Kabupaten Bandung dengan mengutamakan kewenangan bidang lingkungan hidup yang dimiliki serta sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Rencana Strategis BPLH dimulai dari Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

2.1 Visi dan Misi

Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015 BPLH memiliki visi sebagai berikut: **“Terwujudnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang proaktif dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan”**.

Adapun penjelasan perumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Proaktif” memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti bahwa BPLH akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan dan permasalahan lingkungan hidup actual;
2. “Berperan” bahwa BPLH akan bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Agar visi dapat dicapai maka disusun misi yang merupakan suatu kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis. Mengacu kepada visi di atas, maka BPLH menetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;
4. Mengembangkan system informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

Secara umum penyelenggaraan visi dan misi BPLH Kabupaten Bandung tertuang dalam Rencana Strategis BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

2.2 Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPLH seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka BPLH Kabupaten Bandung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan BPLH Kabupaten Bandung untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Dari misi yang telah ditetapkan di atas, masing-masing memiliki tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari misi itu sendiri. Dengan adanya tujuan dimaksud menunjukkan adanya sinkronisasi antar faktor kunci keberhasilan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mendukung Misi BPLH

No.	Misi	Tujuan	Program/Kegiatan
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan aktual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengkajian Dampak Lingkungan ▪ Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ▪ Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
2.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantauan Kualitas Lingkungan, ▪ Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (kegiatan) ▪ Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
3.	Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;	Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura, ▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, ▪ Peningkatan Konservasi DTA dan Sumber-Sumber Air, ▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup ▪ Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
4.	Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (informasi)

No.	Misi	Tujuan	Program/Kegiatan
		pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
5.	Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;	Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ▪ Pengembangan kapasitas Personil Untuk Pendidikan PPLH dan PPNS
6.	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura ▪ Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair, ▪ Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

2.3 Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana BPLH Kabupaten Bandung telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (tahun 2015). Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat dijelaskan pada Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target RPJMD Kabupaten Bandung Tahun Ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan aktual	Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	3	0	1	2	1
2.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Presentase cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/izin lingkungan	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	45%	50%	55%	60%	65%
		Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan	Perolehan Nilai Adipura	74	74	74	74	74
		Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	540	540	540	540	540
		Jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat	7.000	7.000	7.000	8.500	9.000

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target RPJMD Kabupaten Bandung Tahun Ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015
	pengelolaan lingkungan hidup	masyarakat					
4.	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat	Jenis dokumen yang dapat diakses	2	2	3	5	5
		Luas tanah (ha) untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya	600	800	1000	1200	1500
5.	Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Persentase kegiatan penertiban pelanggar hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji	55%	60%	5%	75%	80%
		Jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah	0	0	5	0	2

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis BPLH merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis BPLH Kabupaten Bandung merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Tujuan 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan aktual

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-3.

Tabel 2-3 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup	Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Persentase penyelesaian Petunjuk Teknis Produksi Bersih Industri Tekstil

Tujuan 2: Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-4.

Tabel 2-4 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi
	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki IPAL
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara sumber tidak bergerak
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri
	Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak industri
	Persentase penataan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM)
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM)
	Jumlah sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan mengenai peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup
	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan
	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan
Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	
Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus “cemar berat”	
Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	
Persentase informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	

Tujuan 3: Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-5.

Tabel 2-5 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-3

Sasaran	Indikator Kinerja
Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan serta terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka program Adipura Kota Soreang
	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kebersihan di Kota Soreang (OPSIH /Operasi Bersih, Lomba Bersih-Hijau-Teduh, dan monitoring/pembinaan titik pantau)
	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah sosialisasi konservasi air (teknologi biopori)
	Jumlah bor biopori yang didistribusikan
	Jumlah kegiatan pembersihan sungai /lingkungan
	Jumlah sosialisasi/penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor ,PPLH/KSDA/Saka Kalpataru, Proklam, Ecovillage.
	Jumlah bibit yang didistribusikan
	Jumlah kampanye lingkungan berupa pameran dan peringatan hari Lingkungan Hidup
	Jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan

Tujuan 4: Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-6.

Tabel 2-3 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-4

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup
	Jumlah dokumen/buku Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
	Jumlah Sistem Informasi dan database lingkungan hidup
	Jumlah film kampanye lingkungan
	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Keanekaragaman hayati
	Jumlah Dokumen Penyusunan Pengelolaan Tutupan Vegetasi

Tujuan 5: Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-7.

Tabel 2-7 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-5

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah (Persentase) kegiatan penertiban pelanggaran hukum lingkungan
	Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup
	Persentase pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dengan institusi penegak hukum lain
	Persentase pengembangan personil untuk pendidikan PPLH dan PPNS

Tujuan 6: Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-8.

Tabel 2-8 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-6

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya laboratorium lingkungan yang profesional	Status akreditasi laboratorium dan sertifikasi personil
	Status registrasi laboratorium lingkungan
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas air permukaan dan air limbah
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara emisi
Terkelolanya sarana komunal untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang dibangun Pemerintah
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja BPLH Kabupaten Bandung tahun tercantum dalam Tabel 2-9.

Tabel 2-9 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup	Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
	Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 kajian: - 1 paket DED IPAL	- 712,000,000 (bagian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		<i>Komunal</i>	dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan)
		- 1 paket inventarisasi LH - 1 Perbup izin lingkungan - Sosialisasi Perbup izin lingkungan terhadap 100 stakeholder	
	Persentase Petunjuk Teknis Produksi Bersih Industri Tekstil	0	0
<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan - Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan 	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	390 usaha/kegiatan yaitu: 200 industri, 2 TPA, 14 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 12 agroindustri, 7 RM/hotel, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 30 usaha/kegiatan yang berpotensi menggunakan BPO, 60 usaha/kegiatan terkait SPM PPA dan 40 industri dalam rangka penentuan PPU .	325.000. 000 (kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan)
	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas	3	
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki IPAL	95%	
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara sumber tidak bergerak	95%	
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	95%	
	Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri	55%	
	Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak	55%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	
	bergerak industri			
	Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri	55%		
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM)	100%		
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM)	100%		
	Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain "cemar berat"	5%		
	Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%		
	Jumlah sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan mengenai peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup	5 sosialisasi	140.000.000 (kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran)	
	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan	350 orang		
	Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	100% (1.200 hektar)	112.500.000(Kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan)	
<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan serta terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan - Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka program Adipura Kota Soreang	31 koordinasi/sosialisasi yaitu : 5 kali rapat, 20 kali koordinasi, 6 kali pelatihan	285.000.000 (kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura)	
	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kebersihan di Kota Soreang (OPSIH /Operasi Bersih, Lomba Bersih-Hijau-Teduh, dan monitoring/ pembinaan titik pantau)	6 kali pelaksanaan yaitu : pengadaan sarana pengelolaan sampah (40 buah tong sampah, 25 buah komposter, 50 buah pot bunga, sosialisasi dan pelatihann 150 orang, Lomba kebersihan RW dan sekolah, OPSIH 3 kali		
	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	5		
	Jumlah sosialisasi konservasi air (teknologi biopori)	7	161.500.000.000 (Kegiatan Peningkatan konservasi daeah tangkapan air dan	
	Jumlah bor biopori yang didistribusikan kepada masyarakat	100		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Jumlah kegiatan pembersihan sungai	2	sumber sumber air.
	Jumlah sosialisasi/ penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor (BSMSS, TMMD, Posyandu, BBGR, P2WKSS) dan bantuan alat biopori, composter dan bibit	10 kali sosialisasi	240.000.000 (Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam)
	Jumlah bibit yang didistribusikan	5.000 bibit kayu	
	Jumlah kampanye lingkungan berupa pameran dan peringatan hari Lingkungan Hidup	1	
	Jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan	5	190.000.000 (Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem)
	Jumlah Sosialisasi Pelestarian Keanekaragaman hayati	5	
	Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup	1 laporan
Jumlah dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung		1 buku	95.000.000
Jumlah dokumen Pengelolaan Tutupan Vegetasi		1 buku	
Jumlah film kampanye lingkungan		-	
Jumlah Kampanye Lingkungan		1	25.000.000 (Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam)
Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah (Persentase) kegiatan penertiban pelanggaran hukum lingkungan	22 usaha/kegiatan 100%	140.000.000
	Presentase penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan di bidang lingkungan hidup	100%	
- Terkelolanya sarana komunal untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Terwujudnya laboratorium lingkungan yang	Jumlah sarana pengolahan limbah komunal yang dibangun Pemerintah	1 alat pengolahan air sungai	
	Jumlah sarana dan sarana pengelolaan sampah	65 sarana yaitu : pengadaan sarana pengelolaan sampah (40 buah tong sampah, 25 buah komposter, 50 buah pot bunga.	Termasuk kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
profesional			
	Status akreditasi laboratorium dan sertifikasi personel	90%	500.000.000
	Status registrasi laboratorium lingkungan	90%	
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas air permukaan dan air limbah	75% (air permukaan) 75% (air limbah tekstil)	
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien	75% (udara ambien) 75% (kebisingan)	140.000.000
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara emisi	75%	

BAB III

RENCANA dan PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Dalam tahun anggaran 2014 BPLH Kabupaten Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja kesembilan sasaran tersebut dilakukan dengan mengaplikasikan 38(tiga puluh delapan) dari 45 (empat puluh lima) indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

Hasil pengukuran kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel 3-1 berikut.

Tabel 3-1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup	Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 paket DED IPAL Komunal, 1 paket Inventarisasi LH.	-	-
		Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kajian, yaitu : 1 Perbup Izin Lingkungan, dan sosialisasi Perbup Izin Lingkungan terhadap 100 stakeholder.	1 kajian yaitu : 1 Perda (Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan)	100
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan - Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan 	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	390 usaha/kegiatan meliputi : 200 industri, 2 TPA, 14 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 12 agroindustri, 7 RM/hotel, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 30 usaha/kegiatan yang berpotensi menggunakan BPO, 60 usaha/kegiatan terkait SPM PPA dan 40 industri dalam rangka penentuan PPU .	424 usaha/kegiatan meliputi : 200 industri, 2 TPA, 15 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 14 agroindustri, 8 RM/hotel, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 60 usaha/kegiatan yang berpotensi menggunakan BPO, 60 usaha/kegiatan terkait SPM PPA dan 40 industri dalam rangka penentuan PPU .	108
		Jumlah lokasi pengujian kualitas air sungai	75 lokasi	75 lokasi	100
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	10 lokasi	10 lokasi	100
		Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas	3	3	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
		Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki IPAL	95%	95%	100
		Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara sumber tidak bergerak	90%	100%	100
		Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	95%	96%	100
		Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri	55%	54%	100
		Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak industri	55%	86%	150
		Persentase penataan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri	55%	45%	80
		Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM)	100%	100%	100
		Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM)	100%	100%	100
		Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain "cemar berat"	5%	0%	0
		Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%	97,5%	108
		Jumlah sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan mengenai peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup	5	5	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
		Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan	350	350	100
		Luas tanah yang dipetakan untuk Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	1200 Ha	1200 Ha	100
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan serta terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan - Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka program Adipura Kota Soreang	31 Koordinasi, yaitu : 5 kali rapat, 20 kali koordinasi, 6 kali pelatihan	44 koordinasi, yaitu: 6 kali rapat, 31 kali koordinasi, 7 kali pelatihan	141
		Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kebersihan di Kota Soreang (OPSIH /Operasi Bersih, Lomba Bersih-Hijau-Teduh, dan monitoring/ pembinaan titik pantau)	6 kali pelaksanaan yaitu : pengadaan sarana pengelolaan sampah (40 buah tong sampah, 25 buah komposter, 50 buah pot bunga, sosialisasi dan pelatihan 150 orang, Lomba kebersihan RW dan sekolah, OPSIH 3 kali	25 kali pelaksanaan yaitu : 1 kali lomba RW-ku Bersih; 1 kali lomba Sekolah-ku Bersih; 2 kali OPSIH; 18 kali monitoring dan pembinaan titik pantau; 2 kali pembinaan Kader Lingkungan, 1 kali penanaman dan peletakan pot bunga	416
		Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	20 rapat koordinasi	20 rapat koordinasi	100
		Jumlah sosialisasi konservasi air (teknologi biopori)	7	7	100
		Jumlah bor biopori yang didistribusikan kepada masyarakat	100	100	100
		Jumlah Kegiatan Pembersihan Sungai/lingkungan	2	2	100
		Jumlah sosialisasi/penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor	10	12	100
		Jumlah bibit yang didistribusikan	5.000 bibit pohon	5.000 bibit pohon	100
		Jumlah kampanye lingkungan	1	2	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
		Jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan	11 kali sosialisasi yaitu : 5 kali sosialisasi, 3 kali koordinasi, 1 kali evaluasi Adiwiyata kabupaten, 1 kali Adiwiyata Propinsi dan 1 kali Adiwiyata Nasional	11 kali sosialisasi yaitu : 5 kali sosialisasi, 3 kali koordinasi, 1 kali evaluasi Adiwiyata kabupaten, 1 kali Adiwiyata Propinsi dan 1 kali Adiwiyata Nasional	100
		Jumlah peserta sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan	300	300	100
4.	Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup	1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah dokumen/buku Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	10 buku	10 buku	100
		Jumlah penyusunan Sistem informasi dan database lingkungan hidup	10 buku basis data, 1 paket software	10 buku basis data, 1 paket software	100
		Jumlah film kampanye lingkungan	-	-	-
		Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	1200 Ha	1200 Ha	100
		Jumlah Dokumen/buku Profil keanekaragaman Hayati kabupaten Bandung	1 buku	1 buku	100
		Jumlah Dokumen/Buku Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten Bandung	1 buku	1 buku	100
5.	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang ditertibkan	22 usaha/kegiatan	22 usaha/kegiatan	100
		Presentase penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan di bidang lingkungan hidup	100%	100%	100
6.	- Terkelolanya sarana sarana komunal untuk	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang	1 alat pengolahan air sungai	1 alat pengolahan air sungai	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
	pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Terwujudnya laboratorium lingkungan yang professional	dibangun pemerintah			
		Jumlah sarana dan sarana pengelolaan sampah	65 sarana yaitu: pengadaan sarana pengelolaan sampah (40 buah tong sampah, 25 buah komposter, 50 buah pot bunga.	60 sarana yaitu : 35 tempat sampah terpilah, 25 komposter, 50 pot bunga, 50 pohon pucuk merah	100
		Status akreditasi laboratorium dan sertifikasi personel	90%	90%	100
		Status registrasi laboratorium lingkungan	90%	90%	100
		Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas air permukaan dan air limbah tekstil	75% (air permukaan) 75% (air limbah tekstil)	67% (air permukaan) 100% (air limbah tekstil)	89
		Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien dan kebisingan	75% (udara ambien) 75% (kebisingan)	38,5% (udara ambien) 100% (kebisingan)	92
		Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara emisi	75%	100%	100
		Jumlah data hasil uji kualitas air dan udara	500 data hasil uji kualitas air 30 sampel udara emisi dari data kualitas udara ambien di 10 lokasi	603 Data kualitas air dari 232 sampel limbah industri tekstil dan 66 sampel limbah non tekstil, 278 air sungai/ air permukaan dan 25 sampel air tanah 52 sampel udara emisi, & 6 sampel kebisingan dari data kualitas udara di 10 lokasi udara ambient	120 160

Hasil analisis dan evaluasi terhadap kinerja selama tahun 2014 yang dinilai melalui indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja terhadap target 2014 adalah 96,2%. Sebagian besar realisasi IK terhadap target adalah 100%, yaitu bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan. Beberapa IK

yang belum mencapai target memberikan gambaran bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih harus ditingkatkannya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis pencapaian kinerja sasaran BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014–dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada tahun 2015 dengan realisasi sampai dengan 2014. Rincian pencapaian indikator kinerja utama dapat diilustrasikan dalam Tabel 3-2 berikut.

Tabel 3-2 Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2015	Realisasi s.d. Tahun 2014	%	%(*)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan actual	Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	7	5	71	71
2.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Presentase cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/izin lingkungan	20%	0	0	0
		Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	65%	66% (PPA 55%, PPU 85%, PLB3 60%)	94	92,3 85,7
		Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%	97,5%	108	108
3.	Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perolehan Nilai Adipura	74	71,22	0,96	
		Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	2.700	3480	128	85
		Jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat masyarakat	38.000	37.500	100	98
4.	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat	Jenis dokumen yang dapat diakses	5	3	60	60
		Luas tanah (ha) untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya	1.500	1200	100	80
5.	Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Persentase kegiatan penertiban pelanggar hukum lingkungan	100%	100%	100	60 ²⁾
		Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	100%	100%	100	60 ²⁾

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2015	Realisasi s.d. Tahun 2014	%	% ^{*)}
6.	Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji	80%	75 %	93,75	94
		Jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah	7	6	85	85

Keterangan:

*) konversi kepada pencapaian tahun 2015 untuk target yang bukan merupakan nilai akumulasi

¹⁾ persentase diperhitungkan dengan pencapaiannya pada tahun 2013

²⁾ obyek penertiban dan kasus sengketa setiap tahun dapat berbeda, walaupun target setiap tahun sama

Berdasarkan Tabel 3-2, maka hasil analisis pencapaian sasaran melalui IKU rata-rata terhadap target pada tahun 2014 adalah 66,18%. Dengan demikian, maka untuk mencapai IKU pada tahun 2015 dibutuhkan pencapaian sekira 34% terhadap target.

Berikut rincian dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian misi BPLH.

3.2.1 Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Proaktif di Bidang Lingkungan Hidup

Misi ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi BPLH Kabupaten Bandung, khususnya dalam hal ketersediaan produk hukum atau bahan lain sebagai acuan penyusunan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2014 pencapaian misi ke-1 ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu "Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup".

3.2.1.1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini terdiri dari pekerjaan Penyusunan DED IPAL Komunal, penyusunan dokumen evaluasi program dan kegiatan pengelolaan anak anak sungai Citarum, penyusunan dokumen review kelayakan pengelolaan IPAL Cisirung, Penyusunan kajian pengelolaan limbah B3 beserta subkegiatan koordinasi untuk masing-masing pekerjaan tersebut.

Kegiatan ini baru diselenggarakan pada tahun 2012. Pada tahun 2014, kegiatan ini merupakan mendukung misi ke-1 sebesar 100%.

3.2.2 Misi ke-2: Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pada tahun 2014 pencapaian misi ini diimplementasikan pada 3 (tiga) kegiatan dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut adalah: Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, dan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran.

3.2.2.1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pencapaian kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebanyak 14 IK, yaitu:

- a. Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi (200 industri)
- b. Jumlah lokasi pengujian kualitas air sungai;(75 lokasi)
- c. Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien;(10 lokasi)
- d. Jumlah peningkatan kapasitas dan personil pengawas;(3 personil)
- e. Persentase industri yang dibina/diawasi yang memiliki IPAL;(94%)
- f. Persentase industri yang dibina/diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara;(97%)
- g. Persentase industri yang dibina/diawasi yang memiliki TPS limbah B3;
- h. Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri;(50%)
- i. Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak industri;(86%)
- j. Persentase penataan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri;(44%)
- k. Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM);
- l. Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM);(100%)
- m. Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain “cemar berat”;
- n. Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu.(97,5%)

Kegiatan Pemantauan Kualitas lingkungan pada tahun 2014 terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu: pembinaan dan pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan,serta koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas pembina dan pengawas. Dengan berpedoman pada 14 indikator kinerja di atas, maka capaian kegiatan ini rata-rata 96,6% terdiri dari 7 indikator yang terealisasi 100%, 5 indikator yang terealisasi di atas 100% dan 2 indikator yang terealisasi di bawah 100%.

Empat indikator yang terealisasi di atas 100% adalah jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi; persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara, persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki TPS limbah B3, persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara, dan persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu. Realisasi di atas 100% karena ada beberapa usaha/kegiatan baru yang menjadi prioritas sehubungan dengan dokumen lingkungannya baru terbit atau datanya baru diperoleh dari SKPD dan/atau bidang lain dan meningkatnya penataan teknis usaha/kegiatan akibat pembinaan dan pengawasan yang intensif.

Sementara itu, 2 indikator yang tidak terealisasi 100% adalah persentase penataan teknis administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri dan persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain “cemar berat”. Apabila dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk yang tercapai lebih dari 100%, khususnya dalam kepemilikan TPS limbah B3, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya industri memenuhi penataan teknis, namun belum sepenuhnya menaati ketentuan administrasi berupa perizinan dan pelaporan. Sementara itu, penurunan kualitas air yang ditandai dengan 75 (100%) lokasi sungai yang dipantau berstatus “cemar berat” menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan hanya merupakan salah satu alat pengendalian pencemaran air, selain pembangunan

infrastruktur pengolahan air limbah, penyusunan produk hukum, sosialisasi yang intensif, dan koordinasi serta pembagian peran yang jelas antara berbagai pemangku kepentingan.

Dari 14 indikator kinerja, target 3 indikator tetap untuk tahun 2011 dan 2012, yaitu jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi, jumlah lokasi pengujian kualitas air sungai, dan jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien dengan realisasi di atas 100% atau 100%. Target 6 indikator lebih tinggi daripada tahun 2011 dan 2012, yaitu: presentase industri yang memiliki IPAL, alat pengendali pencemaran udara, dan TPS limbah B3 (target masing-masing indikator pada tahun 2011 adalah 70%, pada tahun

2012 adalah 75%, pada tahun 2013 adalah 95%, dan pada tahun 2014 adalah 100%), pemenuhan SPM pencegahan pencemaran air dan pencegahan pencemaran udara (tahun 2011 adalah 60%, tahun 2012 80%, tahun 2013 100%, dan tahun 2014 100%), dan persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu (tahun 2011 dan 2012 80%, tahun 2013 90%, dan tahun 2014 100%), namun dengan pencapaian yang umumnya masing-masing 100% atau lebih dari 100%. Dengan demikian, maka nampak bahwa dengan target yang ditingkatkan pada tahun 2014, realisasi tercapai 100%. Hal ini berarti ada upaya peningkatan penaatan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan dari usaha/kegiatan sebagai hasil dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini.

Namun demikian, terdapat pula 5 indikator yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, yaitu jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas, persentase penaatan teknis dan administrasi PPA, PPU, dan PLB3; dan persentase lokasi pengujian kualitas air yang berstatus selain “cemar berat” yang mengindikasikan perlunya upaya pengendalian pencemaran lingkungan dalam skema lain.

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan berkontribusi pada pencapaian misi sekira 55%.

3.2.2.2 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Pencapaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan ditentukan melalui persentase lahan yang ditentukan status kerusakannya untuk produksi biomassa. Kinerja ini menjadi salah satu kinerja SPM bidang lingkungan hidup. Dengan berpedoman pada indikator kinerja utama, maka capaian kegiatan ini untuk tahun 2014 adalah 80% atau 1200 Ha. Angka ini didasarkan pada target SPM yang harus dicapai, yaitu pada luas lahan atau tanah dengan potensi rusak tinggi (1500 Ha). Pemantauan dan evaluasi tanah untuk produksi biomassa dengan potensi rusak tinggi dilakukan pada lahan perkebunan di Kecamatan Pangalengan. Sesuai dengan target, maka realisasi kegiatan ini adalah 100%.

Penentuan potensi kerusakan tanah dilakukan dengan mengelompokkan akumulasi skor pembobotan, yaitu hasil kali skor dengan bobot masing-masing peta tematik (kemiringan, curah hujan, tata guna lahan, dan jumlah tanah). Pada prinsipnya semakin tinggi nilai skor yang diberikan, semakin tinggi pula potensi wilayah tersebut mengalami kerusakan tanah.

Kegiatan tahun 2014 ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sama pada tahun 2013. Target persentase informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa untuk tahun 2013 adalah 67% atau 800 Ha pada tanah untuk produksi biomassa pada kategori potensi rusak tinggi di Kecamatan Pangalengan. Dengan demikian, maka pencapaian kinerja untuk tahun 2014 maupun 2013 adalah sama, yaitu 100%.

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan berkontribusi pada pencapaian misi ke-2 sebesar 30%.

3.2.2.3 Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Kegiatan ini diukur kinerjanya melalui 2 indikator, yaitu jumlah sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan dan jumlah peserta sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan. Dari target pelaksanaan, yaitu 5 (lima) kali sosialisasi dengan 350 peserta terealisasi 100%. Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan kepada penanggung jawab/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan umumnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan khususnya. Sosialisasi ini secara langsung meningkatkan realisasi untuk indikator peningkatan persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara, dan kepemilikan IPAL, alat pengendali pencemaran udara, dan TPS limbah B3 pada kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Realisasi kegiatan ini pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sama, yaitu 100%. Namun ada sedikit perbedaannya, yaitu bahwa dalam tahun 2011 dan 2014 jumlah sosialisasi ditargetkan dilaksanakan 5 kali dengan jumlah peserta 350 orang, sementara pada tahun 2012 dan 2013 adalah 4 kali dengan jumlah peserta 350 orang. Dengan demikian, maka pada tahun 2012 dan 2013 untuk setiap sosialisasi jumlah peserta yang menghadiri lebih banyak.

Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran, berkontribusi pada pencapaian misi ke-2 sekira 15%.

3.2.3 Misi ke-3: Melaksanakan koordinasi dan Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Program-Program Pengelolaan Lingkungan

Misi ini dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa proses pembangunan bukanlah merupakan tugas pemerintah semata, melainkan tugas semua komponen masyarakat tak terkecuali dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung yang juga merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup nasional.

Pencapaian misi ini dapat dilihat melalui indikator kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan, dan diaplikasikan melalui 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

3.2.3.1 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Subkegiatan Penilaian Kota Sehat Adipura ini adalah: 6 kali rapat, Sosialisasi dan pelatihan sebanyak 7 kali, 1 kali penyelenggaraan lomba “RW-ku Bersih” dan 1 kali penyelenggaraan lomba “Sekolah-ku Bersih”, 2 kali Operasi Bersih, 18 kali monitoring dan pembinaan titik pantau, koordinasi sebanyak 31 kali, penanaman pohon sebanyak 1 kali, Pembinaan kader lingkungan 2 kali.

Perolehan nilai Adipura Kota Soreang periode tahun 2013-2014 adalah 71,26, masih di bawah target yang ditetapkan yakni 74,00, dengan rincian penilai 2,81 dari tahun sebelumnya. Namun penghargaan Adipura belum dapat diperoleh karena *passing grade* nilai untuk memperoleh penghargaan tersebut adalah 74. Kelemahan dari kecilnya nilai fisik adalah belum memadainya kriteria fisik seperti kondisi drainase, sarana kebersihan, trotoar, pengolahan sampah 3R, keberadaan Bank Sampah, dan kebersihan di beberapa titik pantau. Sedangkan untuk nilai non fisik, nilai yang masih rendah adalah nilai institusi karena dukungan dana APBD untuk program Adipura dan lingkungan hidup dinilai masih rendah.

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 30%.

3.2.3.2 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Subkegiatan Rapat Koordinasi

Subbagian dari Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan merupakan salah satu subkegiatan yang mendorong sasaran ke-3. Pada tahun (2014) telah dilaksanakan 20 rapat koordinasi, dengan pencapaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, maka pencapaian adalah sama 100% dengan target dan realisasi yang berbeda (tahun 2011 7 kali dan tahun 2013 13 kali penyelenggaraan rapat. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan ini pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan topik/isu strategis pengendalian pencemaran lingkungan pada tahun yang bersangkutan.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 5%.

3.2.3.3 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi/penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor. Pada tahun 2014 pencapaian target kegiatan ini sebesar 100% dengan melaksanakan Penunjang Program Terpadu Lintas Sektor (Bakti Manunggal Satata Sariksa atau BMMS, TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD, Posyandu, Bulan Bakti Gotong Royong atau BBGR, Peingkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera atau P2WKSS, dan Kesatuan Gerak atau Kesrak PKK), berupa bimbingan teknis tentang biopori dan komposter, bantuan alat dan bibit; serta terselenggaranya kampanye lingkungan berupa pameran dan peringatan hari lingkungan hidup. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Tahun 2013 adalah sosialisasi Program Kampung Iklim dan Kampung Konservasi. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun namun dengan lokasi yang berbeda seperti tercantum dalam Tabel 3-3.

Tabel 3-3: Perbandingan Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2013 dan 2014

No.	Kegiatan	2013	2014
-----	----------	------	------

		Lokasi	Jenis Bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan
1.	P2WKSS	Ds. Warjabhakti Kec. Cimaung	12 buah bor biopori, 3000 bibit tanaman, 12 unit komposter skala rumah tangga 10 unit takakura	Ds. Mandalawangi Kec. Nagrek	12 buah bor biopori,5000 bibit tanaman,400 tanaman TOGA 12 unit komposter skala rumah tangga.
2.	TMMD	Ds. Cikoneng dan Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay		Ds. Campakamulya Kec. Cimaung	
3.	BBGR dan HKG	Ds. Sadu Kec. Soreang		Ds. Nagrog Kec. Cicalengka	
4.	Posyandu	Ds. Rancakasumba Kec. Solokan Jeruk		Ds. Nagrak Kec. Pacet	
5.	Kesrak PKK			Ds. Cibodas Kec. Kutawaringin	
6.	BSMSS	Ds. Mandalawangi Kec. Nagrek		Ds. Cibodas, Kec. Kutawaringin	
7.	Program Kampung Iklim	Ds. Lamajang dan Ds. Pulosari Kec. Pangalengan			
8.	SAKA kalpataru			Bale Sawala Kab. Bandung	
9	SAKA Kalpataru			Kwarcab Kab. Bandung	
10	PPLH			SMP Pasirjambu	
11	PPLH			SMP Margahayu	
12	Agroforesty			Desa Pulosari Kec. Pangalengan	
13	Ecovillage			BPLH Kab. Bandung	

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 20%.

3.2.3.4 Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Indikator kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi upaya konservasi sumber daya alam. Pencapaian target kegiatan ini adalah 100% dengan terselenggaranya Sosialisasi Upaya Konservasi Air yang diikuti oleh 280 peserta di Desa Margahayu selatan Kec. Margahayu, Kec. Katapang, Kec. Solokan Jeruk, Desa Ciapus Kec. Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Desa Cangkuang Kec. Cangkuang, Desa Bojongsari Kec. Bojongsoang. Terselenggaranya 2 (dua) kali pembersihan lingkungan/sungai, yaitu di S. Citarum Desa padamulya, Ds. Majalaya, Ds. Sukamaju dan Ds. Majaserta Kec. Majalaya. Korve missal sepanjang jalan Kopo mulai dari Jl. Sayati hingga jembatan Sungai Citarum.

Dibandingkan tahun 2013, kegiatan ini tidak ada perbedaan, selain lokasi pelaksanaannya yang berbeda dan keikutsertaan kegiatan pembersihan sungai melibatkan dan bekerjasama dengan Lanud Sulaeman. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan air dan sumber sumber air berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sebesar 20%

3.2.3.5 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Indikator kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) kepada 300 warga sekolah.

Kegiatan ini merupakan gambaran terjadinya sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program pengelolaan lingkungan, dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan warga sekolah khususnya dan masyarakat di sekitar sekolah yang mendapat pembinaan Program SBL dan Adiwiyata.

Pada tahun 2014 target kegiatan ini adalah penyelenggaraan 5 kali sosialisasi SBL dengan peserta sebanyak 300 orang dengan melibatkan perwakilan sekolah berbagai tingkatan, Lokasi kegiatan adalah SMPN 1 Cimaung, SMAN 1, Margahayu, SMAN 1 Cicalengka, SMAN 1 Baleendah dan SMPN 1 Margahayu.

Selain sosialisasi/pembinaan SBL juga dilaksanakan evaluasi/penilaian Program Adiwiyata/SBL tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional. Kegiatan ini bila dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 capaian target kinerjanya adalah sama yaitu 100%, namun dengan jumlah dan lokasi sekolah binaan yang berbeda sebagai berikut:

Tabel 3-4 Daftar Penghargaan Program Adiwiyata/SBL Tahun 2013

No.	Penghargaan Tingkat Kabupaten	Penghargaan Tingkat Provinsi	Penghargaan Tingkat Nasional
1.	SD. Talenta	SD Talenta	SD Alam Pelopor
2.	SD. Percobaan Cileunyi	SMPN 1 Ciparay	SMPN 1 Cimaung
3.	SMPN 1 Ciparay	SMPN 2 Cileunyi	SMPN 1 Nagrek
4.	SMPN 1 Cileunyi	SMAN 1 Margahayu	
5.	SMPN 2 Cileunyi		
6.	SMPN 3 Baleendah		
7.	SMPN 1 Margaasih		
8.	SMP Sandhy Putra		
9.	SMP Karya Bhakti		

Tabel 3-5 Daftar Penghargaan Program Adiwiyata/SBL Tahun 2014

No.	Penghargaan Tingkat Kabupaten	Penghargaan Tingkat Provinsi	Penghargaan Tingkat Nasional
1	SD. Galih Pawarti	SMPN 3 Baleendah	SD Talenta
2	SD. Al Maburur	SMPN 1 Margaasih	SMPN 1 Ciparay
3	SD. Ibum Kamojang	SMP Sandhy Putra	SMPN 2 Cileunyi
4	SMPN 1 Pangalengan	SMP karya Bhakti	SMAN 1 Margahayu
5	SMPN 4 Pangalengan	SMPN 1 Katapang	
6	SMPN 1 dayeukolot		
7	SMPN 1 Katapang		
8	SMPN 1 Pasirjambu		
9	SMPN 2 Kertasari		
10	SMAN 1 Baleendah		
11	SMAN 1 Cicalengka		

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 25%.

3.2.4 Misi ke-4: Mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa proses pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup, akan optimal apabila didukung oleh ketersediaan data dan informasi mengenai potensi maupun permasalahan lingkungan hidup yang akurat dan dapat diakses masyarakat. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan melalui Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan dukungan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik.

3.2.4.1 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan berkontribusi pada pencapaian misi ke-4, khususnya untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2014 informasi ini belum menjadi bagian dari informasi BPLH yang dapat diakses melalui internet, sehingga pencapaiannya masih 0.

Kegiatan ini berkontribusi sekira 15% pada misi ke-4.

3.2.4.2 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Untuk Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan telah disusun 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup;
2. Jumlah dokumen/buku Status Lingkungan Hidup (SLH) Kabupaten Bandung;
3. Jumlah Penyusunan Sistem Informasi dan Database Lingkungan Hidup;
4. Jumlah film kampanye lingkungan.
5. Jumlah dokumen/buku Pengelolaan Tutupan Vegetasi
6. Jumlah dokumen/buku Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2014 ditetapkan 6 indikator, yaitu jumlah laporan inventarisasi lingkungan, jumlah buku SLH Kabupaten Bandung Tahun 2013, dan jumlah system informasi lingkungan dan database lingkungan hidup, penyusunan pengelolaan tutupan vegetasi dan profil keanekaragaman hayati. Ketiga indikator kinerja tersebut terealisasi 100%. Pada Tahun 2011, melalui 3 indikator (laporan inventarisasi, buku SLH, dan film kampanye lingkungan, kegiatan ini juga terealisasi 100%. Sementara pada tahun 2012 indikator kegiatan ini hanya 2, tanpa film kampanye lingkungan. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik sebagai pendukung misi ke-4 dalam penyediaan jaringan internet baru dilaksanakan pada tahun 2012 dan tahun 2013.

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan berkontribusi pada pencapaian misi ke-4 sekira 75%.

3.2.4.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik

Untuk tahun 2013 (2014) telah dilaksanakan pemasangan jaringan internet dengan sistem nirkabel untuk kelancaran akses dan publikasi data dan informasi. Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan yang berkontribusi sekira 10% pada pencapaian misi ke-4.

3.2.5 Misi ke- 5: Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan

Misi ini diaplikasikan melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan dimaksudkan untuk menggambarkan sejauhmana peranserta masyarakat khususnya penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya pencapaian misike-5 ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:

a. Terlaksananya penertiban ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari 22 usaha dan/atau kegiatan yang ditargetkan, pada tahun 2014 terlaksana 100%.

Penetapan usaha dan/atau kegiatan tersebut didasarkan pada hasil koordinasi dengan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Perbandingan dengan tahun 2013 dari segi kuantitas jumlah usaha dan/atau kegiatan terjadi kenaikan, yaitu dari 16 usaha/kegiatan menjadi 22 usaha/kegiatan pada tahun 2014. Adapun pencapaian targetnya sama, yaitu 100%.

b. Penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa di bidang lingkungan hidup.

Pada tahun 2014 terdapat 19 pengaduan yang masuk ke BPLH. Dari jumlah pengaduan tersebut, semuanya tertangani, sehingga persentase penanganan sebesar 100%. Jumlah pengaduan secara kuantitas mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang berjumlah sebanyak 17 pengaduan.

Misi ke-5 didukung oleh Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup sebesar 80%, sementara 20% nya adalah dari ketersediaan atau penambahan personil PPNS dan PPLHD.

3.2.6 Misi ke- 6: Mengembangkan Sarana dan Prasarana pendukung dalam Pengelolaan Lingkungan

Dalam rangka pencapaian misi ini ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja melalui 4 kegiatan.

3.2.6.1 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Subkegiatan penyediaan sarana pengelolaan sampah pada kegiatan ini menjadi salah satu pendukung pencapaian sasaran ke-6 ini. Pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, berupa 35 unit tong sampah terpilah, 25 unit komposter, dan 50 pot bunga dan 50 pohon pucuk merah.

Subkegiatan ini berkontribusi pada pencapaian misi ke-6 sebanyak 5%.

3.2.6.2 Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Pada tahun 2014 telah disusun 3 (tiga) indikator kinerja dari kegiatan ini dalam pencapaian sasaran ke-6, yaitu:

- a. Persentase parameter pengujian kualitas air terhadap baku mutu parameter kualitas lingkungan
- b. Status Akreditasi laboratorium lingkungan
- c. Jumlah data kualitas lingkungan dari sampel kualitas air

Indikator kinerja yang pertama adalah persentase parameter pengujian kualitas air, dihitung dengan membandingkan jumlah kemampuan parameter pengujian terhadap jumlah parameter sesuai baku mutu yang ditentukan. Pada tahun 2014,

persentase parameter pengujian kualitas air dibatasi untuk air limbah tekstil dan air permukaan.

Kemampuan jumlah parameter uji untuk pengujian kualitas air pada tahun 2014, 2013, 2012 jika dibandingkan jumlah parameter baku mutu tertera dalam tabel berikut :

No	tahun	Jumlah parameter limbah tekstil			Jumlah parameter air sungai		
		Yg di uji	sesuai baku mutu*)	Persentase	Yg diuji	sesuai baku mutu**)	Persentase
1	2012	9	9	100	21	46	45
2	2013	9	9	100	22	46	48
3	2014	9	9	100	31	46	67

Keterangan : *) Baku mutu limbah tekstil sesuai SK Gubernur Jabar nomor 6 tahun 1999, lampiran II

***) Baku mutu air sungai sesuai PP 82 Tahun 2001

Untuk pengujian limbah tekstil, persentase parameter pengujian terhadap jumlah parameter baku mutu sejak tahun 2012 telah tercapai 100 %, sedangkan persentase parameter air sungai meningkat dan pada tahun 2014 tercapai 67 %, sedangkan target persentase pengujian kualitas air ditetapkan 75%. Sehingga pencapaian indikator ini baru tercapai 89%. Belum tercapainya kinerja ini disebabkan masih terbatas sumber daya laboratorium khususnya peralatan/instrumen pengujian dan bahan kimia.

Indikator kinerja terpeliharanya status akreditasi laboratorium, dilaksanakan karena UPT Laboratorium Lingkungan sejak 30 Maret 2007 telah mendapatkan status akreditasi laboratorium berdasarkan ISO 17025:2005 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Setiap tahun laboratorium harus memelihara status akreditasi melalui unjuk kerja pada kegiatan tahunan survailen laboratorium yang dilakukan oleh asesor dari KAN. Tahun 2014 target kinerja pemeliharaan status akreditasi di UPT laboratorium Lingkungan ditetapkan 90%, mengingat proses survailen tersebut terkait dengan asesor Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses administrasi dan teknis laboratorium membutuhkan waktu setidaknya 4 (empat) bulan setelah pelaksanaan survailen.

Pelaksanaan survailen tahun 2014 untuk UPT Laboratorium telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2014, dari jadwal yang seharusnya tanggal 3 September 2014. Survailen dari KAN dilakukan untuk menilai kompetensi laboratorium, sejauh mana kesesuaian persyaratan manajemen dan teknis dikendalikan untuk menjamin kepuasan customer. Sampai dengan 31 Desember 2014, pihak laboratorium masih menunggu Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerbitkan surat rekomendasi status akreditasi. Pada tahun 2014 target pemeliharaan status akreditasi ditetapkan 90% dan karena sesuai dengan realisasinya maka pemeliharaan status akreditasi pada tahun 2014 telah tercapai 100%.

Jumlah data kualitas lingkungan dari sampel kualitas air ditetapkan sebagai indikator kinerja, untuk melihat kapasitas laboratorium dari sisi jumlah pengujian kualitas air. Sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 jumlah pengujian kualitas air terealisasi diatas 100 %, karena jumlah sampel pengujian setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2012 target sampel 480 sampel terealisasi 481 sampel, sedangkan tahun 2013 dari target 480 sampel terealisasi 490 sampel. Target

jumlah sampel kualitas air di tahun 2014 sebanyak 500 dan terealisasi 658 sampel kualitas air, lebih dari 120%.

Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air di tahun 2014, berasal dari kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan pencegahan pencemaran air di 60 industri, air sungai dari 75 anak sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung yang diambil sampelnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan sampel dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari lingkungan.

Kegiatan pengujian kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair berkontribusi terhadap misi ke-6, sebesar 30%.

3.2.6.3 Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Pada tahun 2014 telah disusun 2 (dua) indikator kinerja dari kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri dalam pencapaian sasaran ke-6, yaitu:

a. Persentase parameter pengujian kualitas udara terhadap baku mutu parameter kualitas lingkungan

b. Jumlah data kualitas lingkungan dari sampel kualitas air udara

Kemampuan jumlah parameter uji untuk pengujian kualitas udara ambien dan emisi pada tahun 2014, 2013, 2012 jika dibandingkan dengan jumlah parameter baku mutu tertera dalam tabel berikut :

No	tahun	Jumlah parameter udara ambien*)			Jumlah parameter udara emisi**)		
		Yg di uji	sesuai baku mutu	Persentase	Yg diuji	sesuai baku mutu	Persentase
1	2012	5	13	38	4	4	100
2	2013	5	13	38	4	4	100
3	2014	6	13	38	4	4	100

Keterangan : *) Baku mutu udara ambien sesuai PP 41 tahun 1999

***) Baku mutu udara emisi bahan bakar batubara sesuai Permen LH nomor 7 Tahun 2007

Sejak tahun 2012 kapasitas laboratorium dalam hal jumlah parameter uji udara ambien dan emisi tetap, karena belum ada penambahan sumber daya, baik peralatan, bahan kimia dan personel pengujian. Keterbatasan sumber daya menyebabkan parameter kualitas lingkungan khususnya parameter udara ambient yang mampu kita uji terbatas. Sedangkan untuk pengujian udara emisi laboratorium telah mampu menguji sesuai parameter baku mutu emisi dengan bahan bakar batu bara dan solar.

Kapasitas laboratorium dari sisi jumlah pengujian kualitas udara dari tahun 2012, 2013 dan 2014 , tertera pada tabel berikut :

No	Jenis sampel pengujian	Jumlah sampel/tahun					
		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Udara ambien	10	10	10	10	10	66
2	Udara emisi	15	15	30	39	39	56

Untuk pengujian udara ambien, tahun 2012 s/d 2014 jumlah lokasi sampel pengujian terealisasi 100 %, sedangkan untuk pengujian udara emisi pada tahun 2012 terealisasi 100 % dan pada tahun 2013 dan 2014 jumlah pengujian udara emisi terealisasi diatas 100% dari target pengujian.

Kegiatan pengambilan sampel udara ambien dilaksanakan untuk mengetahui kualitas udara dilokasi padat transportasi (Kopo Sayati), daerah Majalaya dan Dayeuhkolot untuk mewakili daerah padat industri dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Babakan Ciparay untuk mengetahui kualitas udara ambien disekitar TPA. Sedangkan kegiatan pengujian udara emisi adalah pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan pencegahan pencemaran udara, dimana pada tahun 2014 target kegiatan SPM sebanyak 40 sampel udara emisi cerobong industri.

Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri berkontribusi terhadap misi ke-6, sebesar 30%.

3.2.6.4 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Pada tahun 2014 telah disusun 1 (satu) indikator kinerja dari kegiatan ini dalam pencapaian sasaran ke-6, yaitu: Terpenuhinya persyaratan sarana prasarana sesuai Permen LH nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Pada tahun 2014 melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan dilaksanakan pengadaan alat laboratorium kimia berupa 1 unit Atomic Absorber Spectrophotometer, untuk pengujian kadar logam di dalam air.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan berkontribusi terhadap misi ke-6, sebesar 20%. Sehingga ketiga kegiatan yang dilaksanakan tersebut berkontribusi pada misi ke-6 sekira 80 %.

3.2.6.5. Kegiatan alat penjernih air

Pada tahun 2014 kegiatan ini tidak dilakukan.

Perhitungan pencapaian realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kinerja pada tahun 2014 tercantum dalam Tabel 3-6.

Tabel 3-6 Pencapaian Realisasi Kegiatan Tahun 2014

No.	Misi	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Nilai
		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	100%	100 %
		Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	0	0	
2.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;	Pemantauan Kualitas Lingkungan,	96,6%	55%	98,1%
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (kegiatan)	100%	30%	
		Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	100%	15%	
3.	Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura,	100%	30%	100%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan (Sub Kegiatan Rapat Koordinasi)	100%	5%	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam,	100%	20%	
		Peningkatan Konservasi DTA dan Sumber-Sumber Air,	100%	20%	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	100%	25%	

No.	Misi	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Nilai
4.	Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	10%	80%
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (informasi)	0%	20%	
		Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	100%	70%	
5.	Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
		Pengembangan kapasitas Personil Untuk Pendidikan PPLH dan PPNS	0	0	
6.	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	100%	5%	90%
		Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair,	90,8%	90%	
		Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	89,8%	90%	
		Alat penjernih air			

Berdasarkan Tabel 3-6 dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mendukung misi BPLH Kabupaten Bandung adalah 93 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pendapatan

Untuk tahun anggaran 2014 BPLH tidak mengelola pendapatan.

3.3.2 Belanja

Rencana Belanja BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014 berdasarkan perubahan APBD tahun 2014 adalah sebesar Rp11,338,467,500 terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 4,553,176,000; Belanja Langsung sebesar Rp 6,785,291,500, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 662,265,000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4,366,321,500, dan Belanja Modal sebesar Rp.1,756,705,000.

Rencana dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tertuang dalam Tabel 3-7 berikut.

Tabel 3-7 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung BPLH Tahun 2014

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%

1.	Belanja Tidak Langsung	4,553,176,000					
	Belanja Pegawai	4,553,176,000	3,914,437,283	85,97%			
2.	Belanja Langsung :				6,785,291,500	6,275,360,323	
	Belanja Pegawai				662,265,000	659,555,000	
	Belanja Barang/jasa				4,366,321,500	3,955,443,073	
	Belanja Modal				1,756,705,000	1,660,362,250	
	Jumlah				6,785,291,500	6,275,360,323	92,48%

Dari target belanja BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014 sebesar Rp.11,338,467,500 (setelah perubahan anggaran) dapat direalisasikan sebesar Rp.10,189,797,606 (92,48%) dengan sisa Rp.1.148,669,894. Anggaran tidak terserap seluruhnya diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya sisa pembayaran Gaji
- Adanya efisiensi beberapa kegiatan dan sisa lelang tanpa mengurangi volume fisik yang telah direncanakan.

Adapun Rincian Belanja dan Realisasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3-8.

Tabel 3-8 Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	11,338,467,500	10,189,797,606	1,148,669,894
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,553,176,000	3,914,437,283	638,738,717
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,553,176,000	3,914,437,283	638,738,717
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3,720,187,000	3,104,523,373	615,663,627
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	832,989,000	809,913,910	23,075,090
	BELANJA LANGSUNG	6,785,291,500	6,275,360,323	509,931,177
1.08.1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	648,943,500	599,689,249	49,254,251
1.08.1.08.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33,600,000	21,889,249	11,710,751
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,600,000	21,889,249	11,710,751
1.08.1.08.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	47,489,000	47,059,500	429,500

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	27,000,000	27,000,000	-
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,489,000	20,059,500	-
1.08.1.08.01.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	47,500,000	44,725,000	-
	Belanja Barang dan Jasa	47,500,000	44,725,000	-
1.08.1.08.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	58,434,500	57,976,000	458,500
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	1,080,000	1,080,000	-
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,354,500	56,896,000	458,500
1.08.1.08.01.01.11	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	42,750,000	40,820,500	1,929,500
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,750,000	40,820,500	1,929,500
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak & Pengandaan	42,750,000	40,820,500	1,929,500
1.08.1.08.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN	7,125,000	6,815,000	310,000
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,125,000	6,815,000	310,000
1.08.1.08.01.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	190,000,000	189,136,000	864,000
1.08.1.08.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	190,000,000	189,136,000	864,000
1.08.1.08.01.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5,700,000	5,700,000	-
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,700,000	5,700,000	-
1.08.1.08.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28,500,000	21,600,000	6,900,000
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,500,000	21,600,000	6,900,000
1.08.1.08.01.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KELUAR DAERAH	124,670,000	103,830,500	20,839,500
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124,670,000	103,830,500	20,839,500
1.08.1.08.01.01.20	RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KEDALAM DAERAH	63,175,000	57,362,500	5,812,500

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,175,000	57,362,500	5,812,500
1.08.1.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	857,648,000	765,209,589	92,438,411
1.08.1.08.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	420,750,000	405,616,250	15,133,750
1.08.1.08.01.02.05.2.3	Belanja Modal	420,750,000	405,616,250	15,133,750
1.08.1.08.01.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	225,500,000	220,900,000	4,600,000
1.08.1.08.01.02.22.5.2.3	Belanja Modal	225,500,000	220,900,000	4,600,000
1.08.1.08.01.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN KANTOR	211,398,000	138,693,339	72,704,661
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211,398,000	138,693,339	72,704,661
1.08.1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,700,000	25,500,000	200,000
1.08.1.08.01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11,400,000	11,340,000	60,000
1.08.1.08.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	6,460,000	6,400,000	60,000
1.08.1.08.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,940,000	6,400,000	60,000
1.08.1.08.01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	9,500,000	9,360,000	140,000
1.08.1.08.01.06.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	3,300,000	-
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,200,000	6,060,000	140,000
1.08.1.08.01.06.05	PENYUSUNAN RENCANA DAN PENGANGGARAN KEGIATAN	4,800,000	4,800,000	-
	Belanja Pegawai	4,800,000	4,800,000	-
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,518,000,000	2,318,857,820	199,142,180
1.08.1.08.01.16.01	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA	285,000,000	280,452,500	4,547,500
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai	97,070,000	97,020,000	50,000
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187,930,000	183,432,500	4,497,500

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.16.03	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	325,000,000	292,326,050	32,673,950
1.08.1.08.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	13,600,000	13,600,000	-
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	311,400,000	278,726,050	32,673,950
1.08.1.08.01.16.04	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	140,000,000	131,121,000	8,879,000
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140,000,000	131,121,000	8,879,000
1.08.1.08.01.16.12	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	712,000,000	675,537,770	36,462,230
1.08.1.08.01.16.12.5.2.1	Belanja Pegawai	103,400,000	103,400,000	-
1.08.1.08.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	608,600,000	572,137,770	36,462,230
1.08.1.08.01.16.14	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,056,000,000	939,420,500	116,579,500
1.08.1.08.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	150,980,000	150,980,000	-
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	905,020,000	788,440,500	116,579,500
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	697,500,000	647,426,500	50,073,500
1.08.1.08.01.17.06	PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN	201,000,000	177,346,500	23,653,500
1.08.1.08.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	33,460,000	33,460,000	-
1.08.1.08.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167,540,000	143,886,500	23,653,500
1.08.1.08.01.17.07	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER AIR	161,500,000	156,594,000	4,906,000
1.08.1.08.01.17.07.5.2.1	Belanja Pegawai	29,000,000	26,400,000	2,600,000
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132,500,000	130,194,000	2,306,000
1.08.1.08.01.17.10	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	95,000,000	93,350,000	1,650,000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	39,250,000	39,250,000	-
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,750,000	54,100,000	1,650,000
1.08.1.08.01.17.14	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA	240,000,000	220,136,000	19,864,000
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	45,400,000	45,400,000	-
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194,600,000	174,736,000	19,864,000
1.08.1.08.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMAL SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	430,000,000	420,444,000	9,556,000
1.08.1.08.01.19.02	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	430,000,000	420,444,000	9,556,000
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	12,865,000	12,865,000	-
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	417,135,000	407,579,000	9,556,000
1.08.1.08.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	1,607,500,000	1,498,233,165	109,266,835
1.08.1.08.01.20.02	PENGUJIAN EMISI/POLUSI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI	217,500,000	216,424,795	1,075,205
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131,085,000	130,013,295	1,071,705
1.08.1.08.01.20.02.5.2.3	Belanja Modal	86,415,000	86,411,500	3,500
1.08.1.08.01.20.03	PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR	500,000,000	493,018,370	6,981,630
1.08.1.08.01.20.03.5.2.1	Belanja Pegawai	38,200,000	38,200,000	-
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375,750,000	369,209,870	6,540,130
1.08.1.08.01.20.03.5.2.3	Belanja Modal	86,050,000	85,608,500	441,500
1.08.1.08.01.20.05	PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN	140,000,000	114,090,000	25,910,000
1.08.1.08.01.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	56,400,000	56,400,000	-
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,600,000	57,690,000	25,910,000
1.08.1.08.01.20.07	PENGEMBANGAN SARANA	750,000,000	674,700,000	75,300,000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN			
1.08.1.08.01.20.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,010,000	2,010,000	-
1.08.1.08.01.20.07.5.2.3	Belanja Modal	747,990,000	672,690,000	75,300,000

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Secara umum pencapaian visi yang terinci dalam 6 (enam) misi BPLH Kabupaten Bandung pada tahun 2014 telah dilaksanakan melalui 8 Program dan 30 kegiatan, termasuk 4 program dan 17 kegiatan yang harus ada di SKPD dan 4 program dan 13 kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan urusan bidang lingkungan hidup.
- b. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, BPLH telah menetapkan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja (IK), 38 diantaranya menjadi IK dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014. Hasil analisis dan evaluasi terhadap kinerja tahun 2014 yang dinilai melalui IK tersebut menunjukkan bahwa realisasi IK terhadap target adalah 96,2%. Sementara itu, perhitungan pencapaian realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mendukung keenam misi BPLH adalah 94,5%.
- c. Berdasarkan Target Jangka Menengah telah ditetapkan 13 IKU (Indikator Kinerja Utama). Adapun hasil analisis dan evaluasi IKU terhadap target pada tahun 2015 adalah 66,18%.
- d. Pencapaian kinerja keuangan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp11,338,467,500 terrealisasi sebesar Rp. 10.189.797.606 terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 3,914.437.283 ; Belanja Langsung sebesar Rp 6.275.360.323, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 659.555.000 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.955.443.073, dan Belanja Modal sebesar Rp.1,660.362.250.
- e. Kendala pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi akan terus dievaluasi dan diperbaiki dalam tahun-tahun mendatang. Beberapa permasalahan serta solusi yang dapat diupayakan, serta tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 tercantum dalam Tabel 4-1 berikut.

4.2 Langkah Ke Depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja BPLH Kabupaten Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis sebagai solusi diantaranya adalah:

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh BPLH Kabupaten Bandung serta mewujudkan peningkatan baik SDM, sarana prasarana, kelembagaan maupun pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tupoksi BPLH Kabupaten Bandung;

- b. Menyelaraskan serta mengaplikasikan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Menjalinkan kemitraan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai instansi pemerintah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait;
- d. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sehingga mereka mau dan mampu secara bersama-sama dengan pemerintah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 4.1 Permasalahan, Solusi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan BPLH Tahun 2014

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
1.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya penataan ruang Kota Soreang, sehingga belum ada pemanfaatan ruang kota yang serasi, optimal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sebagai wadah bagi penduduk dalam menjalankan berbagai kegiatan perkotaan. Saat ini masih terdapat pemukiman kumuh, kesemrawutan di pusat Kota Soreang (Pasar dan terminal), belum tertatanya PKL dan terbatasnya jaringan saluran drainase ▪ Masih banyaknya kriteria fisik yang harus diperbaiki, terutama dalam penghijauan kota, penyediaan tempat sampah terpilah 3 warna, dan sarana 3R ▪ Belum dipahaminya oleh semua komponen masyarakat bahwa Program Adipura bukan merupakan program sesaat tetapi merupakan program yang berkelanjutan, ▪ Masih kurangnya peran aktif semua komponen masyarakat dan kontribusi SKPD terkait dalam mensukseskan program Adipura, ▪ Masih terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Masih kurang memadainya dukungan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengadaan penghijauan, tempat sampah terpilah dan fasilitasi pembentukan bank sampah ▪ Peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap titik pantau ▪ Peningkatan koordinasi dengan stake holder terkait dengan program adipura ▪ Peningkatan partisipasi pihak ke-3 dalam penghijauan dan penyediaan sarana pengumpulan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penghijauan, pengadaan sarana pengelolaan sampah, dan sosialisasi pengelolaan sampah ▪ Melaksanakan monitoring dan pembinaan titik pantau secara periodik ▪ Melaksanakan rapat koordinasi dengan stake holder terkait ▪ Melaksanakan sosialisasi program Adipura kepada pihak ke-3 (industri, developer, dan masyarakat);
2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih lambatnya peningkatan penataan penganggungan jawab usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan ▪ Belum adanya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang sudah dilantik oleh Bupati Bandung. ▪ Kurangnya sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ▪ Mengikuti diklat PPLHD dan melantik PPLHD Kabupaten Bandung ▪ Adanya sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan yang memadai, terutama dapat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan lebih intensif; ▪ Mengajukan diklat PPLH dan mengajukan pelantikan PPLHD kepada BKPP Kabupaten Bandung ▪ Mengajukan penambahan anggaran sarana mobilitas pembinaan dan

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
		<ul style="list-style-type: none"> Adanya parameter pengujian kualitas lingkungan yang belum dapat diuji oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH atau nilai hasil pengujian yang berbeda dengan laboratorium lain. Sulitnya mengevaluasi hasil kegiatan apabila dilakukan secara manual. 	<p>menjangkau wilayah yang jauh dengan medan yang berat</p> <ul style="list-style-type: none"> Penambahan parameter pengujian dan selalu meningkatkan kinerja laboratorium Adanya sistem informasi lingkungan (SIL) yang didukung dengan hardware yang memadai 	<p>pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> Merekomendasikan UPT Laboratorium Lingkungan BPLH untuk mengajukan anggaran penambahan parameter pengujian dan selalu meningkatkan kinerja laboratorium Meningkatkan sistem informasi lingkungan (SIL) sehingga dapat menjadi sarana untuk melakukan evaluasi
3	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya data aktual yang dapat dijadikan dasar penyusunan Masterplan IPAL Komunal Sulitnya implementasi pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah karena memerlukan anggaran yang besar dan kerap munculnya masalah non teknis di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan asumsi-asumsi yang logis sebagai pengganti tidak adanya data yang akurat dan aktual Mencari alternatif sumber dana dan melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan infrastruktur air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Secara aktif mencari alternatif sumber data yang akurat dan aktual dari berbagai sumber Membuat surat pengajuan bantuan dana kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
4.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan Tidak dimilikinya PPNS lingkungan hidup Kurangnya sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun draft perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan Penambahan personil untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Penambahan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat dan mengajukan draft perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan Mengajukan untuk mengikuti diklat PPNS lingkungan hidup Mengajukan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
5.	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran Masih rendahnya pemahaman industry terkait dengan kegiatan produksi bersih sehingga masih ada penolakan saat peninjauan proses produksi dan kurangnya data yang terkait dengan efisiensi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan anggaran yg ada Melakukan pendekatan seoptimal mungkin kepada beberapa industri skala besar 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan penambahan anggaran Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara periodik

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
6.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	<p>proses produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya parameter pengujian tanah yang belum dapat diuji oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH ▪ Kurangnya sarana mobilitas yang memadai untuk pembinaan dan pengawasan serta pemantauan Kurangnya SDM yang memiliki keterampilan teknis untuk pemantauan kerusakan tanah ▪ Belum tercapainya SPM pelayanan informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan anggaran penambahan sarana dan prasarana pengujian agar dapat melakukan pengujian tanah secara lengkap (uji fisika, kimia dan mikrobiologi) ▪ Mengajukan anggaran penambahan sarana mobilitas yang memadai untuk pembinaan dan pengawasan serta pemantauan ▪ Mengajukan pelatihan teknis terkait pemantauan kerusakan lahan/tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tetap melaksanakan kegiatan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa ▪ Tetap mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut agar memenuhi SPM sesuai target pencapaian
7.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program mitigasi perubahan iklim, yaitu Kampung Iklim (Proklam) dan Program Kampung Konservasi relatif masih baru ▪ Kurangnya data upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang akan diusulkan untuk Proklam 	<p>Peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sosialisasi Proklam dan Kampung Konservasi ▪ Melaksanakan monitoring dan pendampingan secara berkala
8.	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya data aktual atau terlambatnya rilis data dari SKPD/dinas/instansi terkait ▪ Tidak sesuai format data pada SKPD/dinas/instansi terkait dengan format data pada pedoman Penyusunan SLHD ▪ Adanya format data yang tidak tersedia pada SKPD/Dinas/Instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperolehnya data aktual, sehingga memudahkan evaluasi ▪ Adanya format data yang sesuai atau hampir sesuai dari SKPD/Dinas/Instansi terkait ▪ Adanya kesesuaian format data yang tercantum dalam pedoman penyusunan SLHD dari KLH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan surat mengenai permohonan data dari awal tahun ▪ Merekomendasikan penyesuaian format data kepada SKPD/Dinas/Instansi terkait ▪ Memberi masukan kepada KLH sebagai penyusun pedoman untuk menyesuaikan format
9.	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kemampuan parameter uji karena terbatasnya (jumlah dan jenis) alat uji udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan pengguna jasa dalam menetapkan parameter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan anggaran untuk pengadaan peralatan pengujian udara

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
	Industri	ambien dan alat uji udara emisi	yang diuji, agar disesuaikan dengan kemampuan laboratorium	ambien dan udara emisi
10.	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padan dan Limbah Cair	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kemampuan parameter uji karena terbatasnya (jumlah dan jenis) alat uji kualitas air ▪ Laboratorium belum bisa melakukan pengujian untuk parameter B3 karena belum memiliki alat uji B3 ▪ Laboratorium belum bisa melakukan pengujian untuk sampel tanah karena belum memiliki alat sampling dan alat uji tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan pengguna jasa dalam menetapkan parameter yang diuji, agar disesuaikan dengan kemampuan laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pengujian yang belum ada. Khususnya alat uji B3 dan peralatan sampling dan uji tanah
11.	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya peserta sosialisasi yang bukan pengambil keputusan ▪ Banyaknya isu aktual yang harus disosialisasikan, sementara anggaran terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menekankan dalam setiap sosialisasi dan mencantumkan pada undangan agar yang hadir adalah pimpinan, atau meminta yang hadir agar menyampaikan hasil sosialisasi kepada pimpinan ▪ Adanya anggaran yang memadai untuk mengakomodasi sosialisasi yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif ▪ Mengajukan anggaran yang lebih besar daripada anggaran tahun 2012 ▪ Memilih topik sosialisasi yang paling prioritas

